



**REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SELAKU  
PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.6/SES/HK/01/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
PADA SETIAP PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa agar kegiatan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/ *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dapat berjalan efektif dan efisien, perlu mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada setiap Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Setiap Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SELAKU PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA SETIAP PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

**PERTAMA** : Mengangkat pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada setiap Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

**KEDUA** : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa bertugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan
- d. melaksanakan *E-Purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

KETIGA : ...

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa menerapkan ketentuan prinsip dan etika pengadaan barang/jasa sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka:
1. Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.103/SES/HK/12/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Setiap Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.4/SES/HK/01/2019; dan
  2. Keputusan Pejabat Penanda tangan DIPA/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.06/KPA/08/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pejabat Pembuat Komitmen Program Perencanaan Pembangunan Nasional V dan pada Pejabat Pembuat Komitmen Program Dukungan Manajemen II dan Pelaksanaan Teknis Lainnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Jakarta 2020

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SELAKU  
PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

**HIMAWAN HARIYOGA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PPN/  
SEKRETARIS UTAMA BAPPENAS  
NOMOR KEP.6/SES/HK/01/2020  
TANGGAL 2 JANUARI 2020

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
PADA SETIAP PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

No.	Nama	Jabatan
1	Imron Rosadi Surya, S.Si NIP. 19931005 201802 1 001	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN I
2	Sudira, S.Sos, MAP NIP. 19690627 199802 1 001	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN II
3	Dody Virgo Christopher Ricardo Sinaga, ST, MA, M.Eng NIP. 19800909 200604 1 004	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN III
4	Muhammad Amir Nur Ridho, SE NIP. 19941016 201801 1 003	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN IV
5	Farida Ayu Brilyanti, SE NIP. 19890728 201801 2 004	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN V
6	Retno Ambarwati, SAP, M.AP NIP. 19621210 198811 2 001	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN VI
7	Yanuar Adiantoro, SE NIP. 19740120 200003 1 002	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN VII
8	Prakosa Grahayudiandono, SE, MPA NIP. 19830610 200803 1 001	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN VIII



No.	Nama	Jabatan
9	Ahmad Zainudin, S.Sos NIP. 19740425 199802 1 001	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN IX
10	Ali Muharam, SIP, MSE, MA NIP. 19760103 200604 1 001	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN X
11	Nursyaf Rullihandia S, ST, MM NIP. 19780709 200803 1 001	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN XI
12	Theresia Yut Sartaulina Aruan, ST NIP. 19940301 201801 2 003	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN XII
13	Ir. R. Wahanudin, M.Med.Sc (PH) NIP. 19660912 199303 1 011	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN XV/IKN
14	Uthami Sary, S.Sos, M.Sc NIP. 19820527 200803 2 002	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN XVI/ <i>Compact-2</i>
15	Nur Hikmah Setianingrum, SE NIP. 19890324 201402 2 005	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pejabat Pembuat Komitmen Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas
16	Imelda Benastan, SE NIP. 19910115 201403 2 002	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pejabat Pembuat Komitmen Program DM I dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
17	Ari Prasetyo, SH, MA, MPA NIP. 19850207 200912 1 010	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pejabat Pembuat Komitmen Program DM II dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
18	Suryadi, S.Sos NIP. 19681219 199003 1 003	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pejabat Pembuat Komitmen Program DM III dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
19	David Tinambunan, S.Sos NIP. 19910920 201403 1 001	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pejabat Pembuat Komitmen Program DM IV dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
20	Henri Yusuf Hasibuan, SE NIP. 19671012 199403 1 003	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pejabat Pembuat Komitmen Program DM V dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

No.	Nama	Jabatan
21	Mirza, S.Kom NIP. 19850305 200901 1 009	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pejabat Pembuat Komitmen Program DM VI dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SELAKU  
PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
RR. Rita Erawati